



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

(PPAS)

PRIORITAS PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA

**KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2018**

BANTAENG,

2017

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Sebagai implementasi dari Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, maka selanjutnya disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada prinsipnya Prioritas Pembangunan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang mendesak, mengingat keterbatasan kemampuan dalam berbagai hal (aspek sumberdaya). Disisi lain prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan pengalaman pembangunan dimasa lalu dan masa sekarang (tahun berjalan 2017) dan kemungkinan perkembangan keadaan masa depan (Tahun 2018).

Tema RKPD Tahun 2018 adalah "***Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya dalam mewujudkan pertumbuhan Ekonomi untuk peningkatan Kesejahteraan Masyarakat***" yang merupakan Prioritas Pembangunan untuk Tahun 2018 merujuk pada hasil Musrenbang dan Rencana Kerja (Renja) OPD yang mencakup kegiatan operasional OPD dan kegiatan – kegiatan strategi OPD yang diarahkan pada pencapaian Visi sebagai "**Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Bagian Selatan Sulawesi Selatan**". Berdasarkan Proyeksi capaian pembangunan pada periode perencanaan hingga tahun 2019, intensitas pembangunan semakin meningkat, walau pun masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, titik berat perhatian difokuskan pada kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam menyediakan fasilitas pelayanan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan implementasi 3 (tiga) pilar pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018.

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana digambarkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, Pendapatan Daerah secara umum diproyeksi mengalami peningkatan seiring dengan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berikut disajikan target Perubahan Pendapatan Daerah :

Tabel II.1
Target Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018

NO	JENIS PENDAPATAN DAERAH	PROYEKSI / TARGET TAHUN 2018	DASAR HUKUM
1.1	Pendapatan Asli Daerah	29,772,908,671.10	
1.1.1	Pajak daerah	8,018,006,306.00	
1.1.2	Retribusi daerah	4,598,498,503.00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5,653,277,495.00	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	11,503,126,367.10	
1.2	Dana Perimbangan	516,517,538,000.00	
1.2.1	Dana bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak	19,068,996,000.00	
1.2.2	Dana alokasi umum	497,448,542,000.00	
1.2.3	Dana alokasi khusus	-00	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19,911,076,896.00	
1.3.1	Hibah	-00	
1.3.2	Dana darurat	-00	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	19,911,076,896.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	-00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		566,201,523,567.00	
	Penerimaan Pembiayaan		
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	623,086,589.12	
	Pencairan Dana Cadangan	-00	
	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-00	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-00	
	Penerimaan Kembali pemberian pinjaman	-00	
	Penerimaan piutang daerah	-00	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		623,086,589.12	
JUMLAH DANA TERSEDIA		566,824,610,156.22	

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Rencana Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng yang dituangkan dalam RKPD tahun 2018 disusun berdasarkan pendekatan politis, teknokratis, partisipatif dan top down-bottom up. Prioritas Belanja Daerah tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan tahun 2018 dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2013 - 2018 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.

Tujuan sasaran pembangunan difokuskan pada Visi mewujudkan Bantaeng sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi dibagian Selatan Sulawesi Selatan. Adapun matriks Prioritas Pembangunan dan sasaran antara lain :

Table III.1
Matriks Prioritas Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	OPD yang melaksanakan	Nama Program
1	2	3	4	5
1	PENINGKATAN WAWASAN DAN KAPASITAS MANUSIA	Meningkatnya pembinaan mental dan spiritual bagi segenap generasi muda.	Kesra (Setda) KesbangLinmas Dinas Sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Iman dan Taqwa
2		Optimalnya peran majelis taklim desa / kelurahan dalam mendorong penguatan bina mental dan spiritual penduduk Bantaeng.	Kesra (Setda) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pembinaan Iman dan Taqwa Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan
3		Optimalnya pelaksanaan program pendidikan diniyah, madrasah dan pesantren.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib

4				Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
5		Meningkatnya pendidikan kejuruan (skill).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pendidikan Menengah
6		Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan berbasis IPTEK.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7		Tersedianya kawasan free WiFi pada kawasan strategis Ibu Kota Kecamatan.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8		Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dalam keolahragaan.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Program Pembinaan dan Masyarakatan Olah Raga
9		Meningkatnya pelayanan kesehatan berdasarkan zonasi wilayah untuk peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta gizi.	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
10		Terwujudnya pola hidup bersih dan sehat berbasis pemberdayaan sebagai upaya preventif di bidang kesehatan.	Dinas Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
11		Berkembangnya layanan rumah sakit bertaraf international dalam mewujudkan Bantaeng sebagai pusat Jasa layanan kesehatan.	RSUD Prof. Anwar Makkatutu	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

		Terkendalinya pertumbuhan penduduk.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penataan Administrasi Kependudukan Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran serata Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
1	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam bidang pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan	Meningkatnya produktivitas hasil-hasil pertanian, kehutanan serta perikanan dan kelautan.	Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Kelautan	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Perikanan Tangkap/budidaya
2				
3		Berkembangnya Usaha Perbenihan Masyarakat.	Dinas Pertanian	Program Pengembangan Budidaya Pertanian Program Pengembangan Budidaya Peternakan
4		Berkembangnya Penguasaan dan Pendayagunaan IPTEKIN secara bersistem.	Dinas Pertanian	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
5		Berkembangnya wirausaha benih.	Dinas Perikanan dan Kelautan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
		Berkurangnya	Dinas Pertanian	Program

6		penduduk miskin yang bekerja di sector pertanian.	Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian	peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Program pengembangan budidaya perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pemberian kompensasi gagal panen bagi petani
7		Meningkatnya koservasi, dan rehbilitasi hutan dan lahan berbasis pemberdayaan.	Dinas Lingkungan Hidup	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan
		Meningkatnya fungsi hutan non kayu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.	Dinas Lingkungan Hidup	Program pembinaan dan penertiban industry hasil perkebunan Program pembinaan dan penertiban industry hasil hutan
1	Peningkatan Jaringan Perdagangan Industri dan Pariwisata	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan.	Dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang	Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
2		Optimalnya pelaksanaan pembangunan pelabuhan Bantaeng.	Dinas Perhubungan	Program pembangunan prasarana dan fasilitas

3				perhubungan Program peningkatan pelayanan angkutan
		Berkembangnya pasar berbasis Kecamatan pada kawasan strategis.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
4		Berkembangnya usaha-usaha berbasis home industry olahan hasil-hasil sumber daya alam, berbasis karkteristik desa/kelurahan.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Program peningkatan kapasitas iptek system produksi Program pengembangan industry kecil dan menengah
		Terwujudnya Bantaeng menjadi Daerah tujuan wisata di bagian selatan Sulawesi Selatan	Dinas Pariwisata	Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi wisata
5		Meningkatnya kualitas dan fasilitasi layanan investasi untuk menjaga iklim investasi Sulawesi Selatan untuk memaksimalkan Bantaeng sebagai pusat pengembangan Industri di bagian Selatan Sulawesi Selatan. (Provinsi)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program peningkatan kerjasama perdagangan international Program peningkatan dan pengembangan ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan luar negeri Program pengembangan kemitraan
6				
7				

		Berkembangnya wawasan dan perilaku masyarakat dalam mewujudkan kondisi tertib dan aman dalam pelaksanaan pembangunan dan era globalisasi serta Asean Community 2015.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kesbanglinmas	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindakan criminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1	Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Secara Terpadu	Meningkatnya kualitas dan peran koperasi / BUMDES dalam mendorong usaha UMKM	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program pengembangan lembaga ekonomipedesaan Program penciptaan Iklim Usaha-usaha Kecil Menengah Yang Kunduksif Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah
2				
3		Berkembangnya usaha home industry yang memberikan nilai tambah hasil-hasil pertanian	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Berkembangnya kerjasama antar desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan Potensi Desa (Kons. Publik)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan perempuan di

4				pedesaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah
5		Meningkatnya kontribusi swasta/masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Setda bagian perekonomian	Program peningkatan pelayanan penanaman modal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan pengembangan potensi unggulan daerah Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi dan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
		Terbangunnya kemitraan dengan organisasi social masyarakat dalam pemanfaatan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR).	Dinas Sosial	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
1	Penguatan Kelembagaan Pemerintah	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah Yang Sesuai dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Inspektorat Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Program Peningkatan fasilitasi terhadap layanan publik Program Tindak lanjut hasil Pengawasan
2		Terwujudnya pengendalian dan	BAPPEDA	Program peningkatan

		perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis Teknologi		pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Data/ Informatika/ Statistik Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3		Terwujudnya pelayanan public dan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan innovative berbasis Teknologi	BKD dan PSDM Badan Pengelola Keuangan Daerah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Program Pengembangan data/informasi
4				
5		Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang berkelanjutan.	BKD dan PSDM	Program Pendidkan kedinasan Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6		Meningkatnya kinerja aparat termasuk dalam pemberian pelayanan yang professional kepada pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
		Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,	Program peningkatan partisipasi

7		desa yang professional dalam menyusun perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapabilitas SDM Aparatur desa Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		Meningkatnya kekuatan kelembagaan dan kemampuan pemerintah desa melalui proses pemilihan Kepala Desa berbasis Teknologi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017. bahwa Urusan Wajib dibagi menjadi dua yaitu Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan. Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang tercantum pada table berikut :

Tabel IV.1
Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018

KODE REKENING	NAMA PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80,964,962,914
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	142,731,122,140
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	362,992,850,635
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	52,136,532,650
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14,162,436,200
1.01.06.01	Dinas Sosial	9,921,000,000
1.02.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21,940,874,500
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44,601,661,800
1.02.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	5,590,200,000
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	41,948,000,000
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8,575,053,825
1.02.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6,138,015,775
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	12,520,911,600
1.02.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	24,695,863,500
1.02.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	24,703,294,963
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,629,626,000
1.02.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14,330,392,345
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5,465,000,000
2.01.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	13,258,332,000
2.02.01.01	Dinas Pariwisata	13,569,057,545
2.03.01.01	Dinas Pertanian	30,213,500,000
3.01.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,666,048,603
3.02.01.01	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	41,286,414,300
3.03.01.01	Badan Kepegawaian dan PSDM	19,001,124,000
3.05.01.01	Sekretariat DPRD	27,055,171,100
3.06.01.01	Sekretariat Daerah	59,560,053,735
3.07.01.01	Inspektorat Daerah	5,630,288,269
3.08.01.01	Kecamatan Bantaeng	2,310,000,000
3.08.01.02	Kecamatan Bissappu	5,138,777,200
3.08.01.03	Kecamatan Tompobulu	2,380,086,200
3.08.01.04	Kecamatan Pajukukang	693,264,000
3.08.01.05	Kecamatan Eremerasa	2,036,866,000
3.08.01.06	Kecamatan Uluere	613,865,500
3.08.01.07	Kecamatan Sinoa	1,331,500,000
3.08.01.08	Kecamatan Gantarangkeke	1,094,885,000
3.09.01.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54,950,000,000
3.09.01.02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1,642,463,035

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Bantaeng merupakan hasil renja SKPD yang diverifikasi guna menjaga sinergitas dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, secara lebih detail dapat dilihat pada Table berikut :

4.3. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Plafon anggaran sementara untuk Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2018, dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel. IV.3

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2018

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	306,628,301,438.65
2	Belanja Bunga	46.200.300,00
3	Belanja Subsidi	0,00
4	Belanja Hibah	25,751,026,400.00
5	Belanja Bantuan Sosial	2,000,000,000.00
6	Belanja Bagi Hasil	1,307,616,069.00
7	Belanja Bantuan Keuangan	51,651,753,800,00
8	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00
	JUMLAH	416,135,924,407.65

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun - tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kabupaten Bantaeng dapat dibagi menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA tahun 2017, sementara pengeluaran pembiayaan Kabupaten Bantaeng meliputi penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok utang. Dilihat pada tabel berikut :

Tabel V
Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH	
1	Penerimaan Pembiayaan	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)	623,086,589.12
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-
1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-
1.6	Penerimaan piutang Daerah	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	623,086,589.12
2	Pengeluaran Pembiayaan	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-
2.3	Pembayaran pokok utang	50,178,097,962.12
2.4	Pemberian pinjaman daerah	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	50,178,097,962.12
	Pembiayaan Neto	(49,555,011,373.00)

PENUTUP

Dokumen PPAS Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018 telah disusun melalui proses teknokratik dengan berdasar pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 - 2018, memperhatikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantaeng, hasil reses anggota DPRD Kabupaten Bantaeng dan kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya PPAS yang telah disepakati akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran OPD dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Dokumen PPAS Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018 disusun dengan harapan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat memedomani dan mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional sehingga bermanfaat bagi masyarakat Bantaeng.

Jika dalam proses pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua.

BUPATI BANTAENG

H. M. NURDIN ABDULLAH

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BANTAENG**

SKPD / PROGRAM KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	KEBUTUHAN DANA
		2018	2019
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	80.964.962.914	89.425.467.250
1.01.02.01	Dinas Kesehatan	142.731.122.140	168.682.235.257
1.01.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	362.992.850.635	473.300.705.826
1.01.04.01	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	52.136.532.650	67.079.992.445
1.01.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.162.436.200	15.520.783.400
1.01.06.01	Dinas Sosial	9.921.000.000	9.921.000.000
1.02.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.940.874.500	49.385.241.300
1.02.02.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	44.601.661.800	53.820.000.000
1.02.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	5.590.200.000	6.606.600.000
1.02.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	41.948.000.000	39.819.150.000
1.02.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.575.053.825	9.432.559.208
1.02.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.138.015.775	8.677.080.400
1.02.09.01	Dinas Perhubungan	12.520.911.600	14.710.657.400
1.02.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	24.695.863.500	32.397.108.350
1.02.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	24.703.294.963	27.182.722.109
1.02.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.629.626.000	6.624.301.200
1.02.13.01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14.330.392.345	15.046.911.962
1.02.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.465.000.000	6.329.000.000
2.01.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	13.258.332.000	17.923.332.000
2.02.01.01	Dinas Pariwisata	13.569.057.545	15.769.840.735
2.03.01.01	Dinas Pertanian	30.213.500.000	33.234.850.000
3.01.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.666.048.603	13.571.869.295
3.02.01.01	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	41.286.414.300	37.942.449.800
3.03.01.01	Badan Kepegawaian dan PSDM	19.001.124.000	21.270.000.000
3.05.01.01	Sekretariat DPRD	27.055.171.100	27.415.171.100
3.06.01.01	Sekretariat Daerah	59.560.053.735	63.561.820.130
3.07.01.01	Inspektorat Daerah	5.630.288.269	6.197.389.735
3.08.01.01	Kecamatan Bantaeng	5.350.000.000	3.104.234.620
3.08.01.02	Kecamatan Bissappu	5.138.777.200	5.652.654.920
3.08.01.03	Kecamatan Tompobulu	2.380.086.200	2.558.415.600
3.08.01.04	Kecamatan Pajukukang	693.264.000	819.312.000
3.08.01.05	Kecamatan Eremerasa	2.036.866.000	2.145.000.000
3.08.01.06	Kecamatan Uluere	613.865.500	752.700.000
3.08.01.07	Kecamatan Sinoa	1.331.500.000	1.415.500.000
3.08.01.08	Kecamatan Gantarangkeke	1.094.885.000	1.293.955.000
3.09.01.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	54.950.000.000	60.269.000.000
3.09.01.02	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.642.463.035	1.918.820.000